

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan perdagangan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asyhadie, H Zaeni, Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Greene, Mark R., 1984, *Life and Health Insurance Companies as Financial Institutions*, Luval Farm Enterprise, Inc, Woodburn, USA.
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta,
- Mehr, R.I. and Cammack, E., 1972, *Principles of Insurance*, (Homewood, IL: Ricahrd D. Irwin, Inc.).
- Mulhadi, 2016, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Rajawali Pers, Medan.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemitro, Roni Hanityo, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wijayanta, Tata, 2007, Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 berkaitan dengan pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Ilmiah Hukum Lagality*, Malang, hlm 136.

Wijayanta, Tata, 2014, Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata dan Herry Firmansyah, 2011, Perbedaan pendapat dalam Putusan- putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-undang dan Praktik Kepailitan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata dan Bagas A. H., Muhammad, 2021, *Cross-Border Insolvency*, Mada University Press, Yogyakarta.

Wiley Publishing, Inc., 2006, *Insured is a person Who Pays for and Receives The Prospective Benefit of an Insurance Policy*. Lihat: Susan Ellis Wild (Ed), *Webster's New World Law Dictionary*, Canada.

William, C. Arthur, Jr and Richard M. Heins, 1976, *Risk Management and insurance*, Fift Edition, Mc Graw-Hill, New York.

Winardi, 1984, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Penerbit Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (LN Nomor 337 Tahun 2014, TLN Nomor 5618).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601))

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga JKT. PST.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/202.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor: 001-002/PUU-III/2005

Internet

CNN Indonesia, Adhi Wicaksono. “PKPU Dinilai Lebih Menguntungkan Pemegang Polis Kresna Life”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201226042942-78-586378/pkpu-dinilai-lebih-untungkan-pemegang-polis-kresna-life> , diakses tanggal 5 Maret 2022

Detikfinance, Anisa Indraini. “Kresna Life Diputus Pailit, Bagaimana Nasib Nasabah?”, https://finance.detik.com/moneter/d-5605437/kresna-life-diputus-pailit-bagaimana-nasib-nasabah?_ga=2.105099459.1597016484.1646728168-314500259.1646728168, diakses tanggal 4 Maret 2022

Gatracom, Hendry Roris P. Sianturi. “Pakar Hukum Kepailitan: Putusan PKPU Kresna Life Kurang Pas”, <https://www.gatra.com/news-500040-hukum-pakar-hukum-kepailitan-putusan-pkpu-kresna-life-kurang-pas.html>, diakses tanggal 3 Maret 2022

Katadata.co.id, Ihya Ulum Aldin. “PKPU Berujung Damai, Kresna Life Mulai Bayarkan Polis Nasabah”, <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/6058c196d6beb/pkpu-berujung-damai-kresna-life-mulai-bayarkan-polis-nasabah>, diakses tanggal 3 Maret 2022

Kompas.com, Fika Nurul Ulya, “PKPU Berakhir Damai, Kresna Life Kembali Bayar Para Pemegang Polis”, <https://money.kompas.com/read/2021/03/23/073700126/pkpu-berakhir-damai-kresna-life-kembali-bayar-para-pemegang-polis>, diakses tanggal 23 Februari 2022

Kontan, fahriyadi. “Pengacara nasabah Kresna Life ungkap ketidakberesan proses PKPU”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pengacara-nasabah-kresna-life-ungkap-ketidakberesan-proses-pkpu>, diakses tanggal 23 Februari 2022

Profil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses pada tanggal 18 September 2022

Wawancara :

Simanjuntak, Jimmy, 2022, Permohonan PKPU Terhadap Perusahaan Asuransi, *Wawancara*, 1 Juli.

Purba, James, 2022, PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna, *Wawancara*, tanggal 12 September.